

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN SISTEM INFORMASI DESA (SID) BERBASIS WEBSITE DESA PARANGARGO

**Richo Surya Pradana^{1*}, Gilang Reza Pahlevi²,
Gerin Mayrantika Tengor³, dan Yogi Maulana Aji Dewa Brata³**

¹Program Studi Psikologi, Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng 62-64, Malang, Indonesia, 65146

²Program Studi Teknik Sipil, Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng 62-64, Malang, Indonesia, 65146

³Program Studi Hukum, Universitas Merdeka Malang
Jalan Terusan Dieng 62-64, Malang, Indonesia, 65146

***Email korespondensi:** richo.pradana@unmer.ac.id

Received: 27 05 2026 – Revised: 29 06 2026 - Accepted: 07 07 2026 - Published: 01 08 2026

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah desa untuk mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital. Namun, di Desa Parangargo masih ditemukan permasalahan berupa pengelolaan administrasi yang bersifat manual, keterbatasan akses informasi publik, serta rendahnya literasi digital aparaturnya. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik belum berjalan secara efektif, transparan, dan terintegrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website yang terintegrasi. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Participatory Action Research* (PAR) yang dilaksanakan melalui empat tahapan, yaitu persiapan dan riset; desain dan pengembangan, pelatihan dan peluncuran; serta pendampingan dan keberlanjutan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) menghasilkan website desa yang fungsional dengan sembilan halaman utama, yakni halaman (1) beranda dengan *banner slider* dan *widget* berita; (2) profil dan struktur organisasi desa; (3) layanan publik dengan fitur pengajuan surat secara online; (4) berita dan pengumuman; (5) halaman transparansi untuk publikasi APBDes dan laporan keuangan; (6) katalog UMKM lokal; (7) galeri kegiatan; (8) fitur aspirasi masyarakat; serta (9) panel admin untuk pengelolaan konten. Website juga telah dilengkapi dengan integrasi Google Maps, tampilan responsif yang ramah perangkat seluler, sertifikat SSL untuk keamanan, serta optimasi SEO guna meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas. Selain itu, terjadi peningkatan kapasitas aparaturnya dalam mengelola platform digital. Simpulan menunjukkan bahwa penerapan SID berbasis website sangat optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan tata kelola desa berbasis digital.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Sistem Informasi Desa (SID), *Website*, Parangargo

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengadopsi sistem pelayanan publik berbasis digital sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola pemerintahan. Konsep *e-government* diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Indrajit, 2016).

Pada level desa, digitalisasi menjadi elemen strategis dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga ke tingkat desa, yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini menggarisbawahi pentingnya integrasi teknologi informasi dalam seluruh proses administrasi pemerintahan, sehingga desa sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan digital. Dalam penerapannya, Sistem Informasi Desa (SID) berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang berbasis data. SID berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi yang mencakup data kependudukan, layanan administrasi, informasi pembangunan, hingga transparansi anggaran desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2022) menyatakan bahwa keberadaan SID mampu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa melalui pemanfaatan data yang akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, penerapan SID tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan administratif, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan desa yang berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, transformasi digital di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta belum optimalnya pengelolaan komunikasi digital.

MASALAH

Di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, masih ditemukan sejumlah kendala dalam pengelolaan pelayanan administrasi yang cenderung dilakukan secara manual serta belum tersedianya portal informasi publik yang terorganisasi dengan baik. Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses pelayanan, kurang tertatanya dokumentasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi pemerintahan dengan implementasinya di tingkat desa. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi efisiensi pelayanan, tetapi juga berdampak pada tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat. Transparansi informasi menjadi indikator penting dalam mewujudkan *good governance*,

karena keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Dwiyanto, 2018). Tanpa dukungan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi terkait program desa, penggunaan anggaran, maupun layanan administrasi yang tersedia.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif partisipan dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga pelaksanaan tindakan secara kolaboratif (Creswell dan Creswell, 2018). Pendekatan ini relevan sebab program digitalisasi desa memerlukan peran aktif aparatur sebagai agen perubahan dalam memperkuat pengelolaan informasi publik (Karinda, dkk., 2024; Setianto, dkk., 2021). Dalam penerapannya, desain PAR terdiri atas empat tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi masalah melalui observasi dan diskusi kelompok, (2) perencanaan intervensi bersama tim dan aparatur desa, (3) pelaksanaan intervensi secara partisipatif, serta (4) evaluasi dan refleksi untuk menilai efektivitas kegiatan (Miles, dkk., 2020). Penentuan lokasi di Desa Parangargo, Kecamatan Wagir didasarkan pada hasil pra-survey yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terkait digitalisasi sistem komunikasi desa. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria aparatur desa yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informasi publik, memiliki komitmen dalam pengelolaan platform pascakegiatan, serta memiliki kemampuan dasar teknologi informasi (Creswell dan Creswell, 2018). Jumlah mitra yang terlibat sebanyak enam orang, terdiri dari Sekretaris Desa sebagai koordinator program, dua penanggung jawab *website* desa, dua penanggung jawab media sosial desa, serta satu staf pendukung administrasi. Pemilihan aparatur desa sebagai mitra utama didasarkan pada pentingnya kapasitas sumber daya manusia lokal dalam menjamin keberlanjutan program (Bintara, dkk., 2024). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yang meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*/FGD) bersama perangkat desa, serta studi dokumentasi terhadap data sekunder berupa dokumen administratif desa (Creswell dan Creswell, 2018). Dalam pelaksanaannya, digunakan perangkat keras seperti laptop, proyektor, dan *smartphone*, serta perangkat lunak berupa *framework Laravel* untuk

pengembangan *website*, *Canva Premium* untuk desain konten visual, dan platform Instagram sebagai media komunikasi interaktif. Selain itu, didukung pula oleh infrastruktur digital berupa domain resmi, layanan hosting, dan sertifikat SSL.

Program ini terbagi menjadi dua inisiatif kerja yang saling terintegrasi: pembangunan situs web profil desa serta optimalisasi pengelolaan media sosial desa. Landasan dari penggabungan kedua elemen ini merujuk pada temuan Karinda, dkk., (2024), yang menyatakan bahwa sinergi antara platform web dan media sosial secara signifikan mampu mendorong transparansi tata kelola serta meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat.

Adapun langkah-langkah implementasinya adalah sebagai berikut.

a. Fase 1: Persiapan dan Riset

Pada tahap awal ini, fokus utama terletak pada pengumpulan data dan perancangan fondasi program melalui serangkaian aktivitas berikut :

- Observasi & Konsultasi: Melakukan wawancara mendalam bersama Sekretaris Desa serta perangkat desa terkait guna menyelaraskan kebutuhan.
- Audit Data: Melakukan pemetaan komprehensif terhadap data administratif, mulai dari profil wilayah, struktur organisasi, rincian layanan publik, transparansi APBDes, produk hukum desa, hingga pemetaan potensi lokal.
- Perancangan Teknis: Menyusun arsitektur informasi dan *sitemap* situs web, menentukan platform teknologi yang paling sesuai, serta merumuskan panduan identitas visual (*brand guidelines*).

b. Fase 2: Desain dan Pengembangan

Fase ini menitikberatkan pada konstruksi infrastruktur digital dan strategi konten dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengembangan Situs Web dirancang dengan struktur komprehensif yang mencakup sembilan menu utama:
 - Beranda: Menampilkan *banner slider*, pembaruan berita, dan sorotan UMKM.
 - Profil Desa: Memuat visi-misi, struktur organisasi, dan peta wilayah.
 - Layanan Publik: Portal khusus untuk pengajuan surat secara daring (*online*).
 - Informasi Berkala: Berita, pengumuman, serta galeri dokumentasi kegiatan.
 - Transparansi & Partisipasi: Ruang publikasi APBDes, laporan realisasi program, serta formulir aspirasi warga.
 - Ekonomi Lokal: Katalog digital untuk mempromosikan produk UMKM.
 - Sistem Manajerial: Panel admin untuk pengelolaan konten secara mandiri.



2. Standar Teknis & Fitur Unggulan Untuk menjamin performa optimal, *website* dilengkapi dengan desain responsif, optimasi SEO, sertifikat keamanan SSL, integrasi *Google Maps*, fitur kirim dokumen daring, serta sistem pencadangan data otomatis.
3. Transformasi Media Sosial Mengacu pada strategi dari Karinda, dkk. (2024) serta Surya dan Suparna (2024), langkah yang diambil meliputi:
 - Audit & *Rebranding*: Mengevaluasi akun lama dan meresmikan akun Instagram desa.
 - Strategi Konten: Menerapkan empat pilar konten utama, yaitu *Information Governance* (tata kelola informasi), *Community Engagement* (interaksi komunitas), *Education & Empowerment* (edukasi), serta *Economic Development* (promosi ekonomi).
 - Standardisasi Visual: Pembuatan templat desain yang konsisten sesuai dengan *brand guidelines* yang telah disusun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sistem komunikasi di Desa Parangargo awalnya masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi secara digital. Penyebaran informasi hanya mengandalkan pengumuman lisan, papan informasi, serta grup pesan instan yang minim pendokumentasian terstruktur. Selain belum memiliki situs web resmi dan pengelolaan media sosial yang strategis, desa ini juga belum menerapkan SOP komunikasi digital. Hal tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan, program pembangunan, maupun potensi ekonomi desa menjadi terhambat dan tidak sistematis. Selama fase persiapan dan riset, tim pengabdian berkolaborasi dengan Sekretaris Desa untuk mengidentifikasi kebutuhan komunikasi melalui metode observasi partisipatif, wawancara, FGD, serta studi dokumen. Rangkaian kegiatan ini berhasil merumuskan peta permasalahan komunikasi publik seperti minimnya kanal formal dan ketimpangan distribusi informasi—serta menyusun arsitektur informasi dan *sitemap* untuk kebutuhan *website*. Hasil riset ini mempertegas urgensi pengadaan platform digital yang berfungsi sebagai media transparansi, saluran komunikasi resmi, sekaligus sarana promosi potensi desa.

Program kerja pertama berfokus pada pengembangan situs web profil desa menggunakan *framework* Laravel.



Gambar 1. Tampilan Halaman Utama Website Profil Desa Parangargo (<https://parangargo.id/>)

Pada gambar 1. dijelaskan tampilan halaman utama website yang ada di desa Parangargo. Di dalam website tersebut nantinya akan diisi dengan platform digital fungsional yang mencakup sembilan fitur utama, mulai dari beranda interaktif, profil organisasi, hingga portal layanan persuratan daring. Selain itu, situs ini menyediakan ruang khusus untuk publikasi transparansi anggaran (APBDes), katalog ekonomi kreatif UMKM, serta formulir aspirasi warga. Secara teknis, *website* ini telah dioptimalkan dengan desain responsif, sistem keamanan SSL, optimasi SEO, serta integrasi *Google Maps* untuk memudahkan akses lokasi.

Program kerja kedua difokuskan pada optimalisasi akun Instagram resmi desa melalui penguatan manajemen konten. Langkah awal dimulai dengan audit akun dan penunjukan dua penanggung jawab (PJ) media sosial. Strategi komunikasi disusun berdasarkan empat pilar konten utama: *Information Governance*, *Community Engagement & Storytelling*, *Education & Empowerment*, serta *Economic Development & Branding*. Selain itu, tim merancang kalender konten dan templat desain *Canva* untuk menjaga konsistensi visual. Produksi konten awal mencakup profil desa hingga promosi UMKM, yang bertujuan membangun narasi desa yang transparan dan berdaya.



Gambar 2. Tampilan *Template* Konten Instagram Resmi Desa Parangargo
(4 Pillar Content)

Pada fase pelatihan dan peluncuran, tim pengabdian memberikan pendampingan intensif kepada enam staf desa mengenai tata kelola platform digital. Materi yang disampaikan berfokus pada kemandirian operasional, mulai dari manajemen konten *website* hingga pembuatan materi promosi di media sosial menggunakan *Canva*. Hasilnya, peserta kini mampu memperbarui situs web dan mengunggah konten media sosial sesuai templat tanpa bantuan penuh dari tim. Selain penguasaan teknis, pelatihan ini juga memperkuat pemahaman aparatur mengenai pentingnya digitalisasi dalam mendukung keterbukaan informasi.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa

Selama fase pendampingan dan keberlanjutan, penanggung jawab (PJ) mulai mengoperasikan platform secara mandiri dengan mengunggah konten awal serta memvalidasi data pada halaman Transparansi dan Layanan Publik. Proses evaluasi bersama dilakukan untuk meninjau performa situs, termasuk kecepatan akses dan ketepatan alur informasi. Sebagai penutup, tim menyerahkan seluruh instrumen pendukung seperti panduan pengguna (*user manual*), SOP, *troubleshooting guide*, serta aset desain kepada pihak desa. Ringkasan pencapaian program ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Capaian Program Digitalisasi Komunikasi Desa Parangargo

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Fungsionalitas website	100%	100%	Tercapai
2	Halaman konten terbangun	9 halaman	9 halaman	Tercapai
3	Pembentukan PJ Website	2 orang	2 orang	Tercapai
4	Pembentukan PJ Media Sosial	2 orang	2 orang	Tercapai
5	Template konten media sosial	4 <i>template</i>	4 <i>template</i>	Tercapai
6	<i>Responsiveness (mobile & desktop)</i>	100%	100%	Tercapai
7	Pelaksanaan pelatihan	1 siklus	1 siklus	Tercapai

Secara kualitatif, aparat desa kini memiliki kesadaran yang lebih baik dalam mengelola dokumentasi digital dan menjaga konsistensi narasi antara informasi formal desa dengan konten lainnya. Antusiasme peserta tercermin dari keterlibatan aktif mereka, di mana para aparat tidak hanya menerima materi, tetapi juga mengusulkan ide rubrik berkala dan meminta pengembangan fitur layanan digital tambahan untuk kebutuhan desa di masa depan. Program penguatan tata kelola komunikasi digital di Desa Parangargo telah mencapai hasil yang sesuai dengan target awal. Kehadiran *website* responsif yang dilengkapi fitur transparansi dan layanan publik, serta pengelolaan media sosial yang strategis, menunjukkan bahwa desa ini telah membangun fondasi sistem informasi sesuai mandat UU No. 6 Tahun 2014. Capaian ini memperkuat temuan Karinda dkk. (2024), dimana integrasi ekosistem digital terbukti mampu menyederhanakan birokrasi informasi sekaligus meningkatkan partisipasi warga. Lebih lanjut, keberhasilan ini didukung oleh penelitian Nugroho dan Santoso (2022) serta Nurmansyah dkk. (2024) yang menegaskan efektivitas platform digital dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di tingkat desa maupun kelurahan.

Capaian positif program ini didorong oleh tiga faktor fundamental. Pertama, dukungan kelembagaan melalui penunjukan PJ memastikan pengelolaan informasi terintegrasi dalam struktur desa, memperkuat argumen Febrianto dkk. (2023) bahwa partisipasi staf sejak dini adalah kunci keberlanjutan. Kedua, penerapan metode *Participatory Action Research* (PAR) menjamin solusi yang dihadirkan bersifat kontekstual karena berakar pada kebutuhan lokal. Ketiga, metode pelatihan *learning by doing* terbukti efektif meningkatkan kompetensi digital aparatur, sesuai dengan temuan Mulyani dkk. (2024) dan Alfian dkk. (2024). Hal ini juga mengonfirmasi pemikiran Pitrianti (2023) mengenai urgensi pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola digital yang berjalan beriringan.

Penerapan strategi *content pillar* dalam penguatan media sosial berhasil membangun identitas visual dan narasi yang konsisten bagi desa. Capaian ini memperkuat hasil penelitian Lestari dkk. (2022) mengenai efektivitas Instagram dalam memperluas jangkauan informasi di Desa Cibiru Wetan. Selain itu, temuan ini selaras dengan studi Surya dan Suparna (2024) yang membuktikan peran Instagram dalam memperkuat *branding* program desa, serta Puspitasari dkk. (2024) yang menegaskan bahwa karakteristik visual platform tersebut mampu menjangkau *audiens* secara lebih luas dan masif.

Ditinjau dari dampaknya, sistem informasi desa ini berfungsi sebagai kanal transparansi anggaran, laporan kegiatan, serta pusat informasi layanan yang dapat diakses secara fleksibel. Selain itu, platform ini berperan strategis dalam mempromosikan UMKM dan produk unggulan desa. Model SID ini sangat potensial untuk direplikasi di desa-desa lain, khususnya di wilayah Kecamatan Wagir, selaras dengan konsep *smart village* yang mengintegrasikan TIK untuk pelayanan publik dan pemberdayaan (Lestari dkk., 2022). Secara luas, inisiatif ini mendukung agenda nasional dalam mempercepat digitalisasi perdesaan dan meminimalisir kesenjangan digital.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui penerapan sistem informasi desa (SID) berbasis *website* telah berhasil mewujudkan portal informasi publik yang transparan, responsif, dan partisipatif. Keberhasilan ini ditandai dengan peluncuran *website* fungsional dengan sembilan fitur utama, pembentukan serta

pelatihan penanggung jawab (PJ) khusus, dan penerapan strategi pilar konten. Lebih dari sekadar infrastruktur teknis, program ini juga berhasil meningkatkan literasi digital aparaturnya desa, yang kini lebih adaptif dan terorganisir dalam memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Universitas Merdeka Malang melalui LPPM yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian, Pemerintah Desa Parangargo yang menjadi mitra dan memberikan dukungan penuh selama pelaksanaan kegiatan, serta seluruh aparaturnya desa dan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. A., Rahmawati, D., & Hidayat, N. (2024). Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pelatihan online di Desa Jero Gunung, Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IAIQH*, 2(2), 170–182.
- Bintara, C. S., Pramono, B. N., Pratama, D. Y., & Setiawan, R. (2024). Digitalisasi desa melalui website profile sebagai media informasi dan pemberdayaan: Pengabdian masyarakat di Dusun Semarum Magelang. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (JPEMAS)*, 7(2), 414–434.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Febrianto, A., Saputra, R., & Wulandari, T. (2023). Pengembangan website desa dalam peningkatan informasi dan data penduduk di Desa Trimulyo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri*, 5(2), 20–27.
- Karinda, K., Kede, A., Septiana, G. L., Jayalangi, L. O. S., Sibay, S., & Ulfa, M. (2024). Integrasi komunikasi pemerintahan digital melalui situs web resmi: Studi kasus di Desa Tontouan, Kecamatan Luwuk. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa (JAPD)*, 5(2), 1–13.
- Lestari, P., Anitasari, M., & Firmansyah, H. (2022). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana penyebaran informasi oleh pemerintah Desa Cibiru Wetan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(02), 163-176.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mulyani, S., Rasyid, A., & Pratama, H. (2024). Pemberdayaan aparaturnya desa melalui literasi digital untuk peningkatan produktivitas kerja. *Jurnal Abdimas PHB*, 7(4), 2115–2124.
- Nugroho, Y., & Santoso, A. (2022). Efektivitas website desa dalam meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(2), 89-102.

- Nurmansyah, A., Saputra, R., & Fitriani, L. (2024). Pengembangan sistem informasi dan pembuatan website profil kelurahan sebagai sarana informasi publik di Kelurahan Pager Agung. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 2(3), 379–388.
- Pitrianti, S. (2023). Literasi digital pada masyarakat desa. *SITASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–15.
- Puspitasari, D., Setiawan, B., & Rahmawati, E. (2024). Pemanfaatan Instagram sebagai media promosi potensi Desa Lamong. *Society: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 1–8.
- Setianto, A., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2021). Dampak transformasi digital terhadap perubahan sosial masyarakat perdesaan (studi kasus di Desa Dlingo, Bantul, Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(1), 1-13.
- Surya, I. K. W. A., & Suparna, P. (2024). Sosialisasi platform Instagram sehingga dapat membranding program kerja gotong royong Desa Dauh Puri Kaja. *J-Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9(2), 328–333.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

